

BAB III

PERAN PARIWISATA DALAM PEMBANGUNAN

A. Peran Pariwisata dalam Pembangunan

Tantangan yang dihadapi umat manusia saat ini adalah perubahan peradaban yang terjadi secara cepat, dalam skala besar, dan bersifat fundamental. Perubahan menimbulkan kompleksitas, ketidakpastian dan konflik sebagai peluang namun juga membawa permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pembangunan menyebabkan perubahan keadaan dan pergeseran peran aktor, ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan.

Pengembangan pariwisata dapat meningkatkan perekonomian suatu negara dan dunia. Sektor ini memberikan peluang bagi berbagai kegiatan perekonomian masyarakat. Wisatawan yang berkunjung ke suatu negara mendatangkan devisa bagi negara tersebut. Dengan devisa, negara akan memperoleh dana pembangunan untuk meningkatkan perekonomian dan mengentaskan kemiskinan. Dengan cara ini, devisa meningkatkan

perekonomian negara dan dunia. Oleh karena itu, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu mengintegrasikan kemajuan perekonomian dalam berbagai dimensi dalam skala nasional, regional, dan global. Kemiskinan merupakan permasalahan nasional, regional, dan global yang tidak dapat diabaikan begitu saja, karena menyebabkan kesengsaraan umat manusia. Pengentasan kemiskinan memerlukan dana yang besar. Salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat adalah dengan melibatkan masyarakat miskin dalam berbagai kegiatan yang integratif dengan bisnis pariwisata.

Menganalisis faktor-faktor penyebab kemiskinan merupakan sesuatu yang kompleks. Mulai dari faktor sumber daya manusia, kondisi alam, geografi, kondisi sosial budaya, hingga sistem ekonomi dan politik yang menyebabkan distribusi pendapatan tidak merata atau tidak merata. Seringkali faktor-faktor ini berinteraksi dan tumpang tindih satu sama lain. Faktor rendahnya kualitas sumber daya manusia, kondisi alam dan geografis, serta kondisi sosial budaya berkaitan dengan tingkat keterbelakangan suatu masyarakat pada dasarnya dapat diperbaiki. Namun ada juga faktor alam dan geografis yang tidak dapat diatasi

lagi sehingga menyebabkan kemiskinan absolut yang permanen. Namun banyak ahli berpendapat bahwa faktor dominan penyebab kemiskinan adalah ketidakadilan ekonomi, sosial atau politik yang mengakibatkan apa yang disebut kemiskinan struktural, baik di tingkat negara maupun internasional.

Untuk mendorong perekonomian kerakyatan, banyak ahli yang berpendapat bahwa paket deregulasi dapat secara langsung membantu atau mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan, serta mengatasi kesenjangan antara kelompok ekonomi kuat dan kelompok ekonomi lemah. Untuk itu, selain perlunya peran pemerintah, pengembangan kemandirian masyarakat juga penting. Mengembangkan kemandirian masyarakat selain memerlukan kebijakan publik yang memperhatikan kepentingan masyarakat, juga diperlukan inisiatif dari bawah yang bersumber dari masyarakat.

Pariwisata berbasis komunitas merupakan suatu pendekatan pemberdayaan yang melibatkan dan menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam konteks paradigma pembangunan baru, yaitu pembangunan berkelanjutan (*sustainable development paradigm*). Pariwisata berbasis

komunitas merupakan peluang untuk mengerahkan seluruh potensi dan dinamika masyarakat, guna menyeimbangkan peran pelaku usaha pariwisata berskala besar. Pariwisata berbasis komunitas bukan berarti hanya sekedar upaya kecil dan bersifat lokal, namun perlu ditempatkan dalam konteks kerja sama komunitas global. Dari ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa pariwisata berbasis komunitas adalah pariwisata dimana komunitas atau penduduk setempat memegang peranan penting dan utama dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi dan memberikan manfaat bagi kehidupan mereka dan lingkungan.

Dalam konsep pariwisata berbasis masyarakat memuat konsep pemberdayaan masyarakat, upaya pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya selalu dikaitkan dengan karakteristik sasaran sebagai masyarakat yang mempunyai karakteristik, latar belakang dan pemberdayaan masyarakat, yang terpenting adalah memulainya dari awal. cara menciptakan suasana atau iklim. yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.

B. Pengelolaan Pariwisata

Pengelolaan pariwisata harus mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan pada nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, kemasyarakatan, dan nilai-nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan pariwisatanya dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Menurut Cox (dalam I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta, 2009:30), pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan pariwisata harus berlandaskan kearifan lokal dan cita rasa lokal yang khas yang mencerminkan keunikan warisan budaya dan keunikan lingkungan.
2. Pelestarian, perlindungan dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi landasan pengembangan kawasan pariwisata.
3. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang berakar pada khasanah budaya lokal.
4. Pelayanan kepada wisatawan berdasarkan keunikan budaya dan lingkungan setempat.
5. Memberikan dukungan dan legitimasi terhadap pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, namun sebaliknya mengendalikan dan/atau

menghentikan kegiatan pariwisata jika melebihi ambang batas (daya dukung) lingkungan alam atau akseptabilitas sosial meskipun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Menurut UN-WTO, peran pemerintah dalam menentukan kebijakan pariwisata sangat strategis dan bertanggung jawab pada hal-hal berikut:

1. Membangun kerangka operasional yang melibatkan sektor publik dan swasta dalam menggerakkan laju pariwisata.
2. Menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan legislatif, peraturan dan pengendalian yang diterapkan di bidang pariwisata, perlindungan lingkungan dan pelestarian budaya dan warisan budaya.
3. Menyediakan dan membangun prasarana transportasi darat, laut, dan udara dengan prasarana komunikasi yang lengkap.
4. Mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menjamin pendidikan dan pelatihan yang profesional untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor pariwisata.
5. Menerjemahkan kebijakan pariwisata yang telah disusun ke dalam rencana konkret yang dapat mencakup:

- a. Evaluasi kekayaan pariwisata, aset alam dan budaya serta mekanisme perlindungan dan pelestariannya;
- b. Identifikasi dan kategorisasi produk pariwisata yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif;
- c. Menentukan syarat dan ketentuan untuk menyediakan infrastruktur dan suprastruktur yang diperlukan yang akan berdampak pada kinerja pariwisata, dan
- d. Penjabaran program pembiayaan kegiatan pariwisata, baik untuk sektor publik maupun swasta.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan pariwisata diperlukan pemahaman yang baik baik dari pihak pemerintah sebagai regulator maupun dari pihak pengusaha sebagai pelaku usaha. Pemerintah tentunya harus memperhatikan dan memastikan bahwa pengembangan pariwisata mampu memberikan manfaat sekaligus mengurangi biaya sosial ekonomi dan dampak lingkungan sekecil mungkin. Di sisi lain, para pelaku bisnis yang lebih fokus dan berorientasi pada keuntungan tentu tidak bisa begitu saja melakukan segala cara untuk mencapai keuntungan, namun harus beradaptasi dengan

kebijakan dan peraturan pemerintah. Misalnya melalui peraturan tata ruang, perizinan, lisensi, akreditasi, dan peraturan perundang-undangan. Liu (dalam I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta, 2009: 218) membuat kerangka implementasi kebijakan pariwisata yang paling tidak menyentuh empat aspek, yaitu:

1. Pembangunan dan pengembangan infrastuktur
2. Aktivitas pemasaran
3. Peningkatan kualitas budaya dan lingkungan, serta
4. Pengembangan sumber daya manusia.

C. Kebijakan Pembangunan Pariwisata

Kebijakan merupakan suatu arahan atau pedoman dalam pelaksanaan suatu kegiatan oleh pemerintah yang dinyatakan dalam suatu pernyataan umum mengenai tujuan yang ingin dicapai. Menurut Richadson & Fluker (2004: 184) serta Dowling dan Fennel (2003: 5) mendefinisikan kebijakan sebagai berikut: “kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diadopsi dan dilaksanakan oleh suatu pemerintah, yang dinyatakan sebagai pernyataan luas tentang maksud umum yang memandu tindakan tersebut. pegawai negeri dan pihak lain dalam

melaksanakan keinginan pemerintah” (Richardson dan Flucker, 2004: 184).

“Kebijakan adalah rencana tindakan yang diambil atau dilaksanakan oleh pemerintah atau dunia usaha dan sebagainya, sedangkan strategi mewakili langkah-langkah untuk mencapainya” (Dowling dan Fennel, 2003:5) Istilah kebijakan erat kaitannya dengan perencanaan. Perencanaan menyangkut strategi sebagai implementasi kebijakan, perencanaan merupakan suatu prediksi dan memerlukan beberapa perkiraan persepsi terhadap masa yang akan datang.

Sejarah perkembangan kebijakan pariwisata dunia dimulai dengan berkembangnya industri pariwisata itu sendiri. Pada tahun 1980an terjadi pergeseran paradigma pariwisata (mass pariwisata) ke pariwisata alternatif (alternative tour) dimana industri telah memasuki era globalisasi.

Menurut Fayos-Sola (1996), perkembangan kebijakan pariwisata dunia telah mengalami 3 tahapan generasi yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

1. Paradigma kebijakan pariwisata massal

Generasi ini didasari oleh target mencapai jumlah wisatawan sebanyak-banyaknya, meraih

pendapatan pariwisata sebesar-besarnya, dan menciptakan lapangan kerja di sektor pariwisata.

2. Paradigma kebijakan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat

Periode ini dimulai sekitar tahun 1970-an ketika krisis ekonomi melanda dunia, termasuk pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi dan masa resesi yang panjang. Pada periode ini dampak sosial, ekonomi dan ekologi dari pariwisata mulai terlihat sementara fokus pada pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan pariwisata mulai didefinisikan ulang. Peran pariwisata mulai bergeser untuk mencapai kesejahteraan sosial, tidak lagi sekedar pertumbuhan ekonomi.

3. Paradigma kebijakan pariwisata yang terpadu (holistik).

Pada periode ini mulai disadari bahwa sisi kompetitif memegang peranan yang menentukan dalam industri pariwisata. Kemitraan antara pemerintah, sektor swasta dan organisasi non-pemerintah.

Pembangunan pariwisata memerlukan kebijakan dan perencanaan yang sistematis. Misalnya, pemerintah di semua tingkat dilibatkan dalam penyiapan infrastruktur, tata guna lahan

atau tata ruang, dan sebagainya. Untuk mencapai suatu rencana yang sistematis, diperlukan proses perencanaan yang strategis. Menurut Richardson (2004:241) perencanaan strategis adalah:

Proses manajerial yang mencocokkan sumber daya dan kemampuan organisasi dengan peluang bisnisnya dalam jangka panjang. Ini terdiri dari mendefinisikan misi organisasi dan menentukan tujuan keseluruhan, memperoleh pengetahuan yang relevan dan menganalisisnya, kemudian menetapkan tujuan dan strategi untuk mencapainya. Umumnya perencanaan strategis di bidang pariwisata terdiri dari beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan usaha/perusahaan apa yang akan dimasuki, yang biasanya ditandai dengan misi organisasi yang bergantung pada jenis usaha yang dimasuki.
2. Menentukan tujuan organisasi yang ingin dicapai, yaitu tujuan utama organisasi seperti penguasaan pasar dan pengenalan produk baru.
3. Mengumpulkan informasi dan pengetahuan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kualitas keputusan organisasi yang diambil sangat bergantung pada kualitas informasi yang dikumpulkan.

4. Menganalisis informasi terutama yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT)
5. Menentukan tujuan spesifik yang menentukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan organisasi secara keseluruhan
6. Menentukan strategi untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan
7. Mendistribusikan sumber daya ke setiap program aksi agar berdampak pada strategi yang diambil.
8. Melaksanakan rencana tersebut
9. Mengontrol dan memantau hasil serta melakukan perbaikan bila diperlukan.

D. Strategi Pembangunan Pariwisata

Menurut UN-WTO, peran pemerintah dalam menentukan kebijakan pariwisata sangat strategis dan bertanggung jawab pada hal-hal berikut:

1. Membangun kerangka operasional yang melibatkan sektor publik dan swasta dalam menggerakkan laju pariwisata.
2. Menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan legislatif, peraturan dan pengendalian yang diterapkan di bidang pariwisata, perlindungan

lingkungan hidup dan pelestarian budaya dan warisan budaya.

3. Menyediakan dan membangun prasarana transportasi darat, laut, dan udara dengan prasarana komunikasi yang lengkap.
4. Mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menjamin pendidikan dan pelatihan yang profesional untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor pariwisata.
5. Menerjemahkan kebijakan pariwisata yang disusun menjadi rencana konkrit.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan pariwisata diperlukan pemahaman yang baik dari pihak pemerintah sebagai regulator dan dari pihak pengusaha sebagai pelaku usaha. Pemerintah harus memastikan bahwa pengembangan pariwisata mampu memberikan manfaat sekaligus mengurangi biaya sosial ekonomi dan dampak lingkungan sekecil mungkin. Sebaliknya para pelaku bisnis lebih fokus dan berorientasi pada keuntungan, tentunya tidak bisa asal melakukan segala cara untuk mencapai keuntungan, namun harus beradaptasi dengan kebijakan dan peraturan pemerintah.

Catatan: Peraturan adalah upaya suatu badan (misalnya pemerintah) yang diberi kekuasaan atau wewenang untuk mengatur kegiatan tertentu dalam wilayahnya.

Dalam pengambilan suatu kebijakan dan strategi akan dilibatkan beberapa kelompok yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan, kelompok tersebut dikenal dengan stakeholder (pemangku kepentingan).